

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki otoritas memerintah yang dari sebuah unit politik, kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah, kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political*), apparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.

Pemerintahan dalam arti luas yaitu segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, melainkan juga meliputi tugas- tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Awal mula dibentuknya pemerintah ialah untuk melindungi sistem ketertiban maupun keamanan di masyarakat secara umum sehingga, seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara tenang dan lancar. Diruang lingkup yang berbeda dimana masyarakat dapat memperluas tugas dan fungsi

pemerintah yang tidak hanya sebatas melindungi melainkan juga sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi sebagai pelayan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada masa penjajahan namun, justru pemerintahlah yang melayani masyarakat, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka fungsi dari pemerintahan yaitu:

a) Fungsi Pelayanan

Memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.

b) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Fungsi ini akan banyak di temui di negara-negara berkembang sedangkan, untuk Negara maju fungsi ini hanya akan dilakukan seperlunya.

c) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai kemampuan untuk bisa keluar zona aman disini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Salah satu contoh yaitu ketika

kondisi masyarakat dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, dalam taraf kemiskinan, dalam keadaan tertindas, dan lain sebagainya. Fungsi Pemerintah ini harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud ialah agar mampu mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun sekolah lapangan sehingga tidak menjadi beban pemerintah.

Dari beberapa fungsi daerah yang disebutkan diatas yang menjadi salah satu tugas pokok pemerintah daerah yaitu pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, instansi pemerintah di daerah selalu ada kebutuhan untuk memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di daerah. Hal pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan persoalan pemberdayaan, keluwesan dan kekuasaan untuk memberikan keleluasaan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif, dan kekuasaan untuk melakukannya. Dan tanggung jawab organisasi pemerintah daerah untuk mengembangkan rencana, memilih alternatif dan membuat keputusan pengelolaan kepentingan lokal.

Secara etimologis (bahasa), pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang memperoleh awalan pe- dan akhiran -an yang berarti mempunyai kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti perbaiki ekonomi (terutama kecukupan pangan), perbaiki kesehatan sosial (pendidikan dan sosial), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya

keamanan, terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan khawatir.

Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang. Dengan demikian diharapkan dengan pemberdayaan akan membuat masyarakat bisa meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, misalnya melalui pendidikan yang didapatkan.

Dalam konteks yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat yang berdaya memperoleh kekuatan (*strength*) melalui pemberdayaan, menjadikan masyarakat kuat (*strong*). Secara khusus, pemberdayaan masyarakat melibatkan penguatan kelemahan masyarakat. Tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan di masyarakat. Orang "lemah" membutuhkan bantuan pemerintah untuk membuat mereka lebih kuat memberdayakan kemandirian, dalam hal ini pemerintah yang berkomitmen untuk memberdayakan warganya berarti telah menerapkan beberapa prinsip demokrasi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memampukan dan memandirikan masyarakat. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun daya

dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta proses dimana seseorang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan dalam memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupannya dan memampukan serta memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesehatan termasuk suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dalam rangka mencapai kemandirian yang sehat, pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan tujuan utama dari promosi kesehatan.

Salah satu tugas pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada konteks kesehatan yaitu mengurangi penderita *Stunting* pada anak balita dan baduta yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan baik motorik maupun mental. Indonesia berpartisipasi dalam program Gerakan *Global Scalling Up Nutrition* (SUN) pada tahun 2011. Dasar dari upaya penurunan *Stunting* ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan Presiden ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Strasnas) Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, upaya percepatan penurunan *Stunting*

dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *Stunting* 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga beresiko *Stunting*. Lima Pilar Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan system, data, informasi, riset, dan inovasi.

*Stunting* merupakan keadaan tinggi badan yang kurang pada balita apabila dibandingkan dengan balita seusianya. Menurut *World Health Organization*, kondisi gagal tumbuh ini terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam kurun waktu yang lama sehingga terjadi infeksi berulang. Pola asuh yang tidak memadai

terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan faktor penyebab terjadinya kondisi seperti ini. 1.000 HPK merupakan periode yang dihitung sejak masih berbentuk janin hingga 730 hari pertama setelah bayi dilahirkan. Periode inilah yang menentukan kualitas kehidupan selanjutnya.

Masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Gizi merupakan suatu komponen yang memiliki nilai esensi tinggi yang diperlukan oleh tubuh guna mempercepat proses tumbuh dan berkembang. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung gizi yang cukup sehingga dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi yang seimbang itulah yang akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan fisik seseorang. Apabila seseorang tidak diberi asupan gizi yang baik maka orang tersebut akan mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan permasalahan gizi ganda yaitu kondisi dimana pemerintah Indonesia masih harus berusaha keras mengatasi masalah kekurangan gizi salah satunya adalah *Stunting*.

Apabila mengalami masalah gizi pada periode tersebut, anak akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Keadaan seperti ini harus segera ditindaklanjuti dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. *Stunting* yang terjadi pada balita akan berdampak pada kesehatan anak baik itu dalam waktu dekat maupun di masa yang akan datang. Dalam jangka

pendek, *Stunting* akan mengganggu metabolisme tubuh, pertumbuhan fisik, dan pertumbuhan otak.

Di masa mendatang, anak akan rentan terkena gangguan penyakit seperti jantung, diabetes, stroke, dan kanker. Hal ini tentu saja akan menciptakan generasi yang kurang berdaya saing di masa depan karena seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat membutuhkan pewaris pemimpin bangsa yang siap membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Apabila *Stunting* di negeri ini tidak ditindaklanjuti serius oleh pemerintah, akan berdampak pada pembangunan dan martabat negara dikarenakan adanya penurunan produktivitas, semakin bertambah pula jumlah balita dengan berat dan tinggi yang dibawah rata-rata di masa yang akan datang, dan peningkatan risiko penyakit yang mengiringi proses penuaan.

Dampak yang seperti itulah yang dapat meningkatkan kemiskinan di masa depan dan secara otomatis akan mempengaruhi ketahanan pangan keluarga. Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi *Stunting* akan berpotensi mendapatkan penghasilan dari hasil ia bekerja 20% lebih rendah dari penghasilan anak yang sehat.

*Stunting* yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) dan *growth faltering* (gagal tumbuh) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah *Stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. *Stunting* dibentuk oleh *growth faltering* dan *catch up growth* yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa



kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami *Stunting* bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik.

Kota Bandung termasuk dalam salah satu dari 100 kota/kabupaten prioritas penanganan dan penanggulangan *Stunting* dimana jumlah balita dengan kondisi *Stunting* Kota Bandung pada tahun 2013 adalah 54.786 balita. Persentase Balita *Stunting* tertinggi berada di tahun 2015 (12,83%) dan terendah di tahun 2017 (1,99%). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menangani kasus *Stunting* sudah digalakkan dengan cukup baik. Walaupun masih dalam angka yang cukup tinggi, namun telah terjadi perbaikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Harapan dari Pemerintah Kota Bandung, tahun 2020 Kota Bandung bisa lebih menekan angka *Stunting*. Pemerintah berkolaborasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Upaya penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Barat ini tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 441.05/Kep.829-Bapp/2021 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung melaksanakan program yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mengikuti Asas Desentralisasi. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah *Stunting* yang terdapat di Kota Bandung.

Program “Bebas *Stunting*” ini di selenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). GERMAS

merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan lingkungan, dan Menggunakan jamban. Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksa kesehatan secara rutin.

GERMAS merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan GERMAS, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan kegiatan Badan Penimbangan Balita (BPB) di Kota Bandung tahun 2019, tercatat sebanyak 8.121 Balita (6.53%) dengan status *Stunting* dari

124.319 balita yang ditimbang di Kota Bandung di tahun 2019. Sebesar 1,32% atau 1.641 balita berada pada status sangat pendek dan 5,21% atau 6.480 balita berstatus pendek. Persentase balita *Stunting* tahun 2019 menurun bila dibandingkan persentase tahun 2018. Pada tahun 2017, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat angka Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang cukup tinggi, artinya mayoritas bayi baru lahir di Indonesia sudah mendapat inisiasi menyusu dini.

Kasus kekurangan gizi atau *Stunting* di Kota Bandung Menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, berstatus kuning dengan prevalensi mencapai 20-30 %. Secara presentase, menurut data yang sama, kasus *Stunting* di Kota Bandung saat ini mencapai 26,40 %., Angka *Stunting* di Kota Bandung tahun 2021 turun sebanyak 1,34% dibanding tahun sebelumnya berdasarkan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada bulan penimbangan balita Agustus 2021.

Data Kasus *Stunting* di Kota Bandung Turun Jadi 7,59 Persen di 2022. Terkini kasus *Stunting* di Kota Bandung turun menjadi 7,59 persen dari 9.567 balita menjadi 7.568 balita. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Jumlah Kasus *Stunting* di Kota Bandung**

Nama Kabupaten/Kota	Persentase Balita <i>Stunting</i>	Tahun
Kota Bandung	6.43	2016
Kota Bandung	1.99	2017
Kota Bandung	7.56	2018
Kota Bandung	6.53	2019
Kota Bandung	8.86	2020
Kota Bandung	7.83	2021

(Sumber: Open Data Jabar Dinas Kesehatan,2022)

Berdasarkan data kasus *Stunting* pada tabel di atas diketahui bahwa Kota Bandung masih banyak balita yang terkena *Stunting*. Walaupun pada tahun 2021 kasusnya menurun pemberantasan *Stunting* harus tetap dilaksanakan guna menurunkan jumlah kasus atau jika mungkin meniadakannya. Karena, *Stunting* sangat mempengaruhi pertumbuhan generasi penerus dimana anak *Stunting* memiliki psikomotorik, kognitif dan psikis yang lemah. Anak dengan psikomotorik, kognitif dan psikis yang lemah gampang terserang penyakit dan akan menjadi sumberdaya manusia yang lemah. Sumber daya manusia yang lemah akan menghambat perkembangan suatu negara untuk itu kasus *Stunting* harus ditangani dengan sebenar-benarnya demi menciptakan generasi dan sumber daya manusia yang cemerlang.

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap kondisi *Stunting* di Kota Bandung, karena menimbulkan keterbatasan kegiatan pengukuran dan pemantauan balita, naiknya angka *Stunting* baru, serta peningkatan jumlah warga miskin. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama jajarannya akan menerapkan sejumlah strategi untuk menurunkan angka *Stunting* di Kota Bandung yang ditargetkan menjadi 19,01 % pada tahun 2023.

Adapun strategi tersebut yakni, meningkatkan kolaborasi di setiap tingkatan, percepatan program penurunan *Stunting*, bertambahnya peran lembaga swasta dan masyarakat, naiknya edukasi masyarakat, mendorong kemampuan kelompok masyarakat yang terlibat, dan perbaikan manajemen data terkait *Stunting*. Untuk menjalankan program intervensi penurunan *Stunting*, Pemkot Bandung menyediakan anggaran lebih dari Rp 294 miliar pada tahun 2021.

Menurut data Penilaian Kinerja Kota Bandung dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi *Stunting* Tahun 2021, Terdapat 15 Daerah yang menjadi prioritas lokasi focus (Lokus) *Stunting* di Kota Bandung. Dari 15 Daerah Tersebut, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Wilayah Peyumbang Kasus *Stunting* Terbesar di Kota Bandung**

No.	Kelurahan	Jumlah Kasus
1	Cicaheum	96 Balita
2	Kujangsari	88 Balita
3	Antapani Tengah	85 Balita
4	Ciroyom	77 Balita
5	Caringin	57 Balita

(Sumber: <https://dinkes.bandung.go.id/tag/Stunting,2022>)

Berdasarkan tabel diatas, masih banyaknya angka *Stunting* di beberapa wilayah di Kota Bandung, dan wilayah kasus *Stunting* terbesar terdapat di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan gerakan bersama antara Pemerintah Daerah, Camat, Kades/ Lurah yang menysasar pada remaja, ibu hamil anemia dan kurang energy kronis (KEK) dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitif. Gerakan yang dimaksud adalah pemberian tablet tambah darah (TTD) dan screening anemia. Sasaran pembagian TTD yaitu pada remaja putri Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan jangka waktu seminggu sekali saat kegiatan sekolah dan diawasi oleh guru serta melakukan pemeriksaan hemoglobin (Hb). Selain menysasar pada remaja putri, pemberian TTD

juga diberi kepada ibu hamil dengan disertai pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan.

Pemerintah Dinkes Kota Bandung bersama Indomaret juga menjalin kolaborasi dan membuat Program Primanutri Posyandu bagi Posyandu yang bertepatan di Kecamatan Batununggal Kota Bandung, program tersebut nantinya akan dilaksanakan di beberapa wilayah dengan angka *Stunting* yang paling banyak. Pada kegiatan itu Pemerintah memberikan bingkisan makanan dan minuman bernutrisi kepada masyarakat guna mengurangi angka *Stunting* pada daerah tersebut.

Berdasarkan analisis perhitungan kerentanan yang sudah dilakukan sesuai 20 cakupan indikator tahun 2021, yang menjadi penyebab terbesar *Stunting* di Kota Bandung ialah permasalahan sanitasi dasar, penanganan remaja, dan pola konsumsi masyarakat. Maka dari itu masyarakat Kota Bandung membangun satu organisasi dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dinamakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan sangat berperan penting dalam percepatan penurunan *Stunting*.

Sanitasi dasar dapat diartikan sebagai syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi faktor kesehatan manusia, sarana dari sanitasi dasar melibatkan tiga komponen yaitu penyediaan air bersih, pembuangan sampah rumah tangga dan penyediaan jamban sehat. Hal tersebut berlaku untuk lingkungan tanah, fisik, air, dan juga udara. Penanganan remaja juga menjadi salah satu masalah yang dapat

menyebabkan *Stunting* pada anak nantinya, karena pada masa remaja sering mengalami stress dan kekurangan darah (*anemia*), kemudian juga terjadinya hamil muda menjadi salah satu penyebab terjadinya *Stunting*.

Dalam upaya menurunkan angka *Stunting* di Kota Bandung pada tahun 2022, Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* penting diharapkan dapat memberikan dukungan dan melakukan tindakan nyata. Namun, dalam pelaksanaan program penurunan *Stunting* ini juga terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi oleh pemerintah.

Hambatan pertama adalah minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk program penurunan *Stunting* di Kota Bandung. Anggaran yang terbatas akan membatasi pelaksanaan program yang optimal, misalnya dalam hal membeli bahan makanan bergizi untuk anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, kekurangan anggaran juga akan menghambat pelatihan tenaga medis dan relawan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam pertumbuhan anak.

Hambatan kedua adalah kurangnya koordinasi masyarakat dalam program penurunan *Stunting*. Masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya gizi seimbang akan sulit terlibat secara aktif dalam program ini. Selain itu, masih ada persepsi salah bahwa anak yang kurus adalah anak yang sehat, sehingga masyarakat kurang memperhatikan kesehatan anak mereka. Ada juga masyarakat yang merasa malu kalau orang lain tahu bahwa anaknya mengalami *Stunting*, karena mereka tidak mau dinilai bahwa gagal dalam mengurus anak. Kemudian ada juga masyarakat yang tidak mempunyai waktu dan informasi yang cukup untuk

mendapatkan informasi serta penanganan dalam program penurunan *Stunting* yang dilaksanakan pemerintah. Kurangnya partisipasi masyarakat akan memperburuk situasi dan memperlambat upaya penurunan *Stunting*.

Hambatan ketiga adalah minimnya kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Seringkali terjadi kekurangjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan tugas apa yang harus dilaksanakan dalam program penurunan *Stunting*. Hal ini mengakibatkan penurunan efektivitas program, karena tugas dan tanggung jawab belum terkoordinasi dengan baik.

Untuk meminimalisir permasalahan kesehatan yang ada di Kota Bandung, maka Pemerintah berupaya keras melakukan berbagai kebijakan dan program untuk menurunkan jumlah penduduk yang mengalami kekurangan gizi buruk yang ada di Kota Bandung, sehingga anak-anak yang mengalami *Stunting* dapat merasakan perubahan yang menuntut adanya peningkatan kualitas manusia. Hal ini disebabkan oleh tuntutan era globalisasi dan modernisasi pembangunan di Indonesia melahirkan tuntutan mengenai tingginya kualitas kesehatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menimbang bayi di Posyandu pun bisa dikatakan belum berjalan dengan baik. Sebanyak 30,8% balita belum tercatat dalam data penimbangan di posyandu sehingga menyebabkan basis data belum akurat. Hal ini tentu saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan program intervensi untuk menanggulangi masalah *Stunting* secara lebih efektif. Selain itu, di masa pandemi *Covid-19* seperti saat ini akan ada masyarakat miskin baru yang menyebabkan masyarakat akan semakin sulit memperoleh makanan bergizi. Oleh karena itu



pemerintah harus siap membangun skill keluarga dalam menghadirkan makanan yang sehat bagi anak.

Pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam pertumbuhan anak melalui program edukasi yang efektif. Dalam program ini, pemerintah juga perlu mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk terlibat dalam program penurunan *Stunting*.

Penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan *Stunting* sudah pernah dilakukan dengan judul, analisis, lokasi, yang berbeda-beda. Beberapa penelitian sebelumnya akan peneliti uraikan secara singkat terhadap masing-masing penelitian. Untuk melihat penelitian terdahulu yang peneliti gunakan pada sebagai referensi dan acuan dalam melakukan penelitian dapat dilihat pada table 1.3 berikut.

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
Febi Rama Sipia	Jurnal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan <i>Stunting</i> (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) di Desa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan (2019)	Mendesripsikan pembersyaan masyarakat dalam penanggulangan <i>Stunting</i> di desa pancasila kecamatan natar lampung selatan	Deskriptif Kualitatif	Adanya program penanggulangan <i>Stunting</i> ini, mereka merasakan perubahan dalam hidupnya, sebelum mengikuti prpgram dan setelah mengikut program pemberdayaan tersebut. Perubahan yang dirasakan yaitu tidak mengetahui tentang pentingnya pengecekan kandungan, pentngnya

					mengikuti posyandu, makanan yang bergizi yang diperlukan tubuhwalaupun keadaan ekonomi yang berkecukupan.
Dafiadi	Jurnal	Implementasi Program Penanggulangan <i>Stunting</i> di Dinas Kesehatan Kabupaten Bonne (2021)	Untuk mengetahui perilaku organisasi dan antar organisasi dalam implementasi program penanggulangan <i>Stunting</i> di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	Deskriptif Kualitatif	Perilaku organisasi dan antar organisasi sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari Dinas Kesehatan yang berkerja sama dengan Kepala Desa dan Puskesmas yang akan membentuk tempat penyesuaian untuk melakukan pengarahan mengenai <i>Stunting</i> . Dan selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak seperti BAPEDDA, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan BKKBN terkait apa yang akan dikerjakan dan untuk tindakan kedepannya.
Nurul Zakiyah	Jurnal	Upaya Puskesmas dalam Penanggulangan <i>Stunting</i> di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (2021)	Untuk mengetahui keberhasilan program pemerintah di wilayah puskesmas dalam pencegahan <i>Stunting</i> di Desa Ranah Singkuang	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini upaya pemerintah desa dalam penanggulangan <i>Stunting</i> di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar adalah: Pelatihan

			Kecamatan Kampar		(peningkatan pengetahuan dan keterampilan) kader kesehatan masyarakat Perawatan atau pendampingan ibu hamil, nifas dan menyusui Melakukan pemantauan pertumbuhan balita olah kader dan penyediaan PMT Melakukan kunjungan rumah oleh kader untuk pemantauan pertumbuhan belita
Andi Sri Sulastri	Jurnal	Model Perumusan Kebijakan <i>Stunting</i> di Desa Labbo Kabupaten Banteang (2020)	Untuk mengetahui bagaimana model perumusan kebijakan <i>Stunting</i> di desa Labbo Kabupaten Banteang	Deskriptif Kualitatif	Dilihat dari indikator wawancara menunjukkan bahwa: Model pola kerja sama Model persuasive Pengarahan
Rino Adibowo	Jurnal	Implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (studi di desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)	Untuk mengimplementasikan dan mengetahui Hambatan seperti apa yang dihadapi dalam Mengimplementasikan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 tahun 2006	Deskriptif Kualitatif	Organisasi yang ada ditingkat daerah dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan tidak ada tim khusus atau pembentukan organisasi secara khusus. Kepala dinas menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak ada pembentukan tim atau pun staff khusus, melainkan dipimpin langsung

					oleh Kepala Dinas secara struktural
--	--	--	--	--	-------------------------------------

(Sumber: Hasil Olahan Penelitian 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu pada tabel diatas terdapat persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu permasalahan- permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dan menggunakan metode penelitian kualitatif yang sama dengan metode penelitian yang penulis akan lakukan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lokasi, dan perbedaan waktu penelitian.

Penelitian Terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual.

Keberhasilan dalam mengatasi *Stunting* sangat tergantung strategi intervensi pada waktu yang tepat. Pemerintah memiliki peran yang penting untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat mandiri dan terampil khususnya di Kota Bandung. untuk itu judul dari penelitian ini adalah “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM “BEBAS *STUNTING*” DI KOTA BANDUNG” yang diharapkan nanti dapat memberikan rekomendasi akademis bagi pihak atau instansi yang sedang melaksanakan penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan peneliti di atas, maka untuk mempermudah arah proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan *Stunting* (Gangguan pertumbuhan pada anak) melalui Program “Bebas *Stunting*” di Kota Bandung?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan masyarakat melalui Program “Bebas *Stunting*” di Kota Bandung. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemungkinan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program “Bebas *Stunting*” di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penguatan seperti apa yang dilakukan dalam Pemberdayaan melalui Program “Bebas *Stunting*” di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program “Bebas *Stunting*” di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Penyokongan seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program “Bebas *Stunting*” di Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui pemeliharaan yang dilakukan pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program “Bebas *Stunting*” di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan semoga memiliki kegunaan, diharapkan dapat memberika manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan seputar *Stunting* dan juga sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan *Stunting*. Dan diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam kesehatan Masyarakat khususnya bidang Kesehatan mengenai kejadian *Stunting*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam menerapkan wawasan dalam penerapan teori-teori yang selama ini penulis dapatkan selama berada di bangku kuliah. Hasil penelitian ini juga memberikan pengetahuan dan manfaat bagi peneliti tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat.

- b. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan dan evaluasi mengenai *Stunting* bagi masyarakat kota Bandung. Hasil penelitian ini

juga dapat mengedukasi masyarakat mengenai *Stunting* dan pencegahannya.

c. Bagi Universitas

Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi program studi Ilmu Pemerintahan Unikom agar dapat dijadikan bahan rujukan penelitian mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Unikom di waktu yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *Stunting* pada balita.

